

Dampak Ekonomi Indonesia dari Covid-19

*Maryanti Sitohang¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Unika Santo Thomas

Email : borusitohangmaryanti@gmail.com

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk melihat dampak Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia secara makro berdasarkan kerangka konseptual prediksi McKibbin dan Fernando (2020). Fenomena Covid 19 membawa dampak negatif yang sangat besar. Dampak berupa penghambatan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat Indonesia, paper ini menjelaskan dampak Covid 19 terhadap ekonomi Indonesia secara makro. Hasil menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19 meliputi pada pasokan tenaga kerja 2.084.593 pekerja secara Nasional mengalami PHK dan dirumahkan, melemahnya nilai tukar mata uang, IHSG, cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan inflasi, kredit macet (NPL), serta pelebaran defisit neraca pembayaran dan perdagangan, gangguan produksi dan distribusi bahan baku, terjadinya fenomena *panic buying*, dan terakhir pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 3,74%.

Kata kunci: Covid-19, Ekonomi, Indonesia

Abstract

This paper aims to look at the impact of Covid-19 on the Indonesian economy at a macro level based on the conceptual framework predicted by McKibbin and Fernando (2020). The phenomenon of Covid 19 has a huge negative impact. The impact is in the form of inhibiting economic growth or the welfare of the Indonesian people, this paper explains the impact of Covid 19 on the Indonesian economy at a macro level. The results show that Indonesia's macroeconomic conditions during the Covid-19 pandemic included the supply of labor. increase in inflation, non-performing loans (NPLs), as well as widening the balance of payments and trade deficits, disruptions to the production and distribution of raw materials, the phenomenon of panic buying, and finally government consumption spending which grew by 3.74%.

Keywords: Covid-19, Economy, Indonesia

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atau lebih dikenal dengan fenomena Covid 19 disebabkan penyebaran virus golongan Corona yang telah bermutasi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobati penderitanya. Kasus pertama muncul di kota Wuhan-China pada akhir Desember 2019, hingga tanggal 18 Mei 2020 *World Health Organization* mencatat sudah lebih dari 4,8 juta orang dinyatakan positif di 213 negara dunia. Kondisi ini membuat pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan *social distancing* tidak terkecuali di Indonesia, guna membatasi persebaran virus. Kebijakan ini memiliki dampak besar pada perekonomian Indonesia secara makro.

Dampak negatif yang sangat besar

sudah dapat dilihat dari sisi industri di Indonesia. Sihaloho (2020) menunjukkan bahwa 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah Covid-19. Terdapat 41.876 perusahaan sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 1.052.216 orang dan terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 374.851 orang. Daerah paling banyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah 202 ribu tenaga kerja per 4 April 2020. Sektor yang paling banyak merumahkan/PHK karyawannya adalah sektor pariwisata, tekstil, dan garmen. Hingga 10 April 2020, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan sudah

ada 1.542 Hotel yang tutup di 31 Provinsi di Indonesia. 90% Hotel di Bali juga sudah merumahkan karyawannya.

Perusahaan mengambil tindakan tersebut karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan mengalami kerugian ataupun kebangkrutan. Ada pun penyebab lain dari di PHK nya para karyawan yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi yang di impor dari negara luar seperti dari negara Tiongkok sehingga akan menghambat kegiatan industri. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran akan mengurangi pendapatan atau daya beli masyarakat serta mengurangiproduk domestik bruto (PDB) Indonesia secara makro. Artinya pandemi Covid 19 memiliki dampak berupa penghambatan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat Indonesia secara lebih lanjut, sebagaimana Frey and Stutzer (2002) menilai bahwa kesehatan dan pendapatan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Pemerintah dan bank sentral telah menerapkan beberapa kebijakan fiskal dan moneter untuk merespon guncangan ekonomi akibat fenomena Covid 19 ini, meskipun masih belum efektif.

Rumusan Masalah

Uraian singkat pada latar belakang menjelaskan alasan ketertarikan pemakalah untuk mengkaji tentang tulisan dampak Covid 19 terhadap ekonomi secara makro. Maka dari itu perlu disusun beberapa rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu bagaimana dampak Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia secara makro ?

Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari dibuatnya paper ini adalah mengetahui dampak Covid 19 terhadap ekonomi Indonesia secara makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Djalante *et al* (2020), kasus nol awal yang dilaporkan oleh Indonesia sebelum pandemi global deklarasi oleh WHO dipertanyakan oleh banyak orang. Selama ini, meskipun ada laporan peningkatan jumlah infeksi dari semua negara sekitar Indonesia pada waktu itu, Indonesia tidak mengeluarkan

bentuk apa pun dari pembatasan perjalanan dan karantina tertentu dari wisatawan yang datang / datang kembali ke Indonesia, bahkan dari negara-negara yang sangat parah seperti Cina. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei, yang pada waktu itu, pusat global Covid-19, sementara di saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan.

Setelah laporan infeksi berikutnya, Indonesia mulai menyadari kekeruhan situasi, dan sejak itu mengeluarkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk mengatasi Covid- 19, termasuk menunjuk 100 rumah sakit umum domestik sebagai Rujukan Rumah Sakit Rujukan pada 3 Maret 2020. Namun, meskipun ada upaya seperti itu, jumlah korban terus meningkat dengan cepat. Kurangnya kesiapan Indonesia juga dapat dilihat di seluruh enam blok bangunan dari sistem kesehatan mulai dari pemberian layanan kesehatan, tenaga kerja, sistem informasi, akses ke obat-obatan, pembiayaan sistem kesehatan dan kepemimpinan dan tata kelola. Selain itu, kesiapan yang kurang dari Indonesia menyebabkan beberapa guncangan yang terjadi sebagai dampak terutama pada makro ekonomi di Indonesia menurut, yaitu :

1. Guncangan terhadap Pasokan Tenaga Kerja

Sejak Februari 2020, Indonesia resmi menutup penerbangan dari dan ke Cina. Di samping itu, diberlakukan tiket murah untuk penerbangan domestik. Hingga pada bulan April 2020, pemerintah menerapkan gerakan *Social Distancing* atau pembatasan sosial. Kebijakan ini menganjurkan orang sehat untuk tidak berada dalam keramaian atau kerumunan dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selanjutnya istilah *Social Distancing* diganti dengan *Phsyical Distancing* oleh pemerintah. Tidak hanya itu Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi atau mengurangi penyebaran Covid-19 yakni berupa kebijakan sosial (BPS, 2020).

Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Jokowi melakukan konferensi pers yang bertujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih untuk menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global ini, berlandas pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantina Kesehatan, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan

untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi di suatu wilayah tertentu.

Selain itu pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus semakin menyebar. Menurut Kementerian Kesehatan RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19. Banyak sekolah, Universitas, perkantoran yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan bekerja di dalam rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Namun dengan adanya kebijakan yang diberikan, penerapan PSBB membuat tenaga kerja di Indonesia hampir kehilangan pekerjaannya, karena pada situasi seperti ini usaha di berbagai sektor ekonomi akan menghadapi kerugian besar, yang akan mengancam operasi dan kesehatan para pekerja terutama pada perusahaan-perusahaan kecil, dalam hal ini jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan.

Menurut Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA) menemukan bahwa jutaan pekerja berisiko kehilangan pekerjaannya ketika hampir 100 Negara menutup perbatasan nasional mereka, yang berarti ekonomi global 0,9% pada akhir 2020, atau bahkan lebih tinggi jika pemerintah gagal dalam memberikan dukungan pendapatan dan membantu meningkatkan belanja konsumen. Ketika sektor jasa, terutama Industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, reaksi, perhotelan, dan transportasi secara garis besar industri-industri semacam itu mencakup lebih dari seperempat dari semua pekerjaan di negara-negara tersebut. Ketika suatu bisnis kehilangan pendapatan, maka pengangguran cenderung meningkat tajam, yang akan mengubah guncangan sisi penawaran dan sisi permintaan yang lebih luas lagi bagi perekonomian.

Kemenkeu (2020) mengemukakan kinerja sektoral terdampak negatif wabah Covid-19 di antaranya :

- Dampak Terbesar yakni omzet turun sekitar

lebih dari 30% adalah Sektor Pariwisata (hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan), Sektor Manufaktur (tekstil, kimia, plastik), Sektor Bahan Bangunan dan Alat Berat, Sektor Properti dan Konstruksi, dan Sektor Farmasi.

- Dampak Menengah yakni omzet turun sekitar 10 – 20% adalah Sektor Multifinance, Otomotif, Pusat Perbelanjaan, Peternakan dan Perikanan, Distribusi/Retailer *Non-essential Goods*, dan Sektor Komoditas (perkebunan, tambang, logam, dan mineral).
- Dampak Rendah yakni omzet turun kurang dari 10% adalah Sektor Kemasan, *E-commerce*, Pembangkit Listrik, Alat Kesehatan, Makanan Pokok, Distribusi/Retailer *Essential Goods*, Tembakau, dan Teknologi Informasi.

Berdasarkan terdampaknya kinerja beberapa sektoral di atas, data terbaru Nasional (Haripin, 2020) Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa sekitar 2.084.593 pekerja secara Nasional mengalami PHK) dan dirumahkan. Dari total tersebut, sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor informal. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85% pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat penerapan PSBB oleh pemerintah setempat. Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah/*lockdown* di negara lain juga ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena berbagai perusahaan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku produksi dan mengeksport hasil produksi ke berbagai negara lain. Data Disnaker merinci terdapat 9.096 perusahaan yang merumahkan 72.770 pekerja dan mungkin masih dapat bertambah. Ekonom *Center of Reform Economics* (CORE) dalam beberapa terakhir, gelombang jumlah PHK semakin merembak diberbagai sektor, selain itu ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji pokok karyawan biasanya. CORE memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II/2020 hingga mencapai 9,35 juta orang. Pekerja yang akan mengalami dampak paling parah yakni para pekerja bebas dan pekerja

lepas, berusaha sendiri (berskala mikro). Pada saat ini, diasumsikan wilayah yang terkena dampak terparah yakni di DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat, dan provinsi lain di Pulau Jawa. Pada dasarnya daya tahan ekonomi informal relatif rapuh terutama yang bekerja dengan penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas yang bekerja di sektor formal.

Fenomena tersebut tentu mengkhawatirkan bagi sejumlah pekerja. Sebagai contoh, dalam Nabilla (2020) dari 17 responden berdomisili di Bandung, 94,1% khawatir akan pekerjaan mereka dikarenakan kasus pandemi yang terjadi sekarang, dan sisanya menjawab biasa saja. Soal gaji yang terlambat dan pemotongan gaji, yang mungkin saja bulan berikutnya tidak mendapatkan penghasilan yang semestinya dikarenakan keuangan kantor yang sudah tidak stabil dan terus menurun, sedangkan masih banyaknya kebutuhan yang perlu dikeluarkan untuk keberlangsungan hidup mereka baik dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Terkait jam kerja walaupun dikurangi mereka merasa khawatir akan pemotongan gaji yang mungkin tidak mereka ketahui akan mendapatkan berapa persen dari gaji pokok utama mereka. Pemasukan dan pengeluaran yang tidak stabil, dan menghambat pembuatan produksi suatu barang, sehingga mengganggu kegiatan ekspor yang dapat menjadi tidak stabil serta orderan yang semakin berkurang. Karena pandemi corona ini maka anggaran negara akan banyak dipakai untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia, sehingga bagi para pekerja honorer merasa resah dan takut di PHK karena tidak adanya anggaran. Dan sebagian bekerja di rumah namun tidak

2. Guncangan terhadap Risiko Ekuitas Sektor Ekonomi

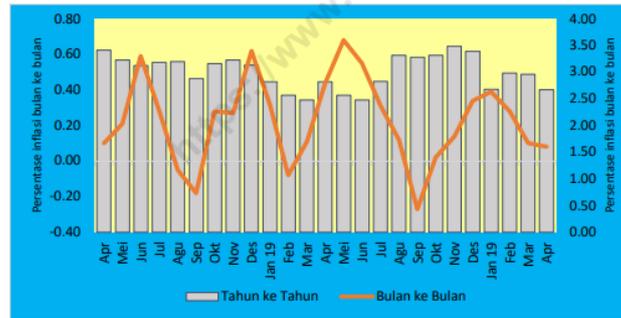
Perekonomian global pada Triwulan I/2020 diperkirakan mengalami kontraksi setelah penyebaran Covid-19 yang bermula dari Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019 keseluruhan dunia. Hadirnya Covid-19 di Indonesia juga memicu risiko pada tata kelola, keuangan, dan kebijakan kesehatan. Risiko politik juga muncul karena adanya bisnis yang sepi/tutup ditambah inflasi dari disrupsi rantai pasok. Menurut BPS (2020), pada April 2020 terjadi inflasi sebesar 0,08%. Dari 90 kota, 39 kota mengalami inflasi dan 51 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Baubau sebesar 0,88% dengan Indeks Harga

mendapatkan pendapatan apapun sehingga merasa resah akan keberlangsungan hidupnya pada masa pandemi ini.

Upaya perlindungan lain juga dicanangkan Kementerian Keuangan yakni melakukan penjadwalan ulang pembayaran pinjaman dari usaha kecil dan menengah (UKM) dan realokasi kebijakan fiskal di tingkat pemerintah daerah. Sementara kebijakan baru telah dikeluarkan dalam minggu terakhir bulan Maret 2020, pada titik waktu ini, ada informasi yang terbatas pada kedua implementasi dari kedua respon keuangan dan moneter dari Kementerian Keuangan. Namun, beberapa tinjauan umum tentang kebijakan tersebut sebagai referensi di masa depan di antaranya :

- Keputusan untuk memperluas asuransi tenaga kerja (BPJS Tenaga Kerja) Covid-19 yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan ini adalah bentuk perlindungan bagi pekerja melalui program transfer tunai 3 bulan di mana pekerja yang terkena dampak berhak Rp 1 juta per bulan.
- Ada ketentuan untuk bisnis minimum langkah-langkah perlindungan termasuk dorongan besar bagi perbankan untuk mengendurkan pembayaran dari kelompok bisnis tertentu yang terlalu berisiko untuk dihapus dari rantai pasokan. Penyebaran virus Covid-19 memiliki yang terbesar berdampak pada sektor bisnis keuangan dan investasi termasuk yang paling terkena dampak seperti Penerbangan, pariwisata, hotel, restoran, pengiriman, dan angkutan (Djalante *et al.*, 2020).

Konsumen (IHK) sebesar 103,16 dan terendah terjadi di Cirebon, Depok, dan Balikpapan masing-masing sebesar 0,02% dengan IHK masing-masing sebesar 102,74, 105,84, dan 103,27. Inflasi April 2020 yang sebesar 0,08%, lebih rendah dibanding kondisi April 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2020 sebesar 0,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2020 terhadap April 2019) sebesar 2,67 persen. Tingkat inflasi nasional MoM (*Month-on-Month*) dan YoY (*Year-on-Year*) pada April 2018 – April 2020 dapat dilihat melalui Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Tahun ke Tahun, April 2018 – April 2020.

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan gambar di atas, tiga bulan terakhir pasca menyebarnya Covid-19 di Indonesia pada tingkat inflasi tahun ke tahun belum melampaui tingkat inflasi pada akhir tahun 2019. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi April 2020 sebesar 0,08% dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,17%, penurunan

indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,14%, dan penurunan indeks pada komponen bergejolak (*volatile*) 0,09%. Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 dibandingkan triwulan I-2019 (YoY) tumbuh 2,97% dan dibanding triwulan IV-2019 (QoQ) mengalami kontraksi sebesar 2,41%, dapat dilihat melalui Gambar 2.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (QoQ) dan (YoY)

Sumber : BPS, 2020

Selanjutnya, SMERU Research Institute (2020) merilis hasil simulasi dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Berbeda dengan proyeksi ideal pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5 persen, kajian tersebut menerangkan bahwa angka itu akan turun dari 4,2 hingga 1% karena dampak penyebaran Covid-19. Jadi, jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya terkoreksi menjadi 4,2%, tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,22% hingga 9,71%. Artinya, jumlah orang miskin Indonesia kemungkinan akan bertambah sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika ekonomi hanya tumbuh antara 1,2 dan 1%, tingkat kemiskinan diperkirakan menanjak antara 12,21 hingga 12,37%. Jumlah orang miskin naik sebanyak 8,03 hingga 8,45 juta atau total orang miskin di Indonesia menjadi antara 32,82 dan 33,24 juta. Melihat situasi dan proyeksi ekonomi tersebut, pandemi Covid-19 tampak telah jauh berkembang dari suatu krisis kesehatan yang perlahan bereskalasi menjadi

krisis sosial-ekonomi.

Secara umum, keberadaan krisis ekonomi dapat terlihat dari kondisi beberapa indikator, seperti melemahnya nilai tukar mata uang, IHSG, cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya peningkatan inflasi, kredit macet (NPL), serta pelebaran defisit neraca pembayaran dan perdagangan. Walau belum masuk ke dalam situasi resesi, mencermati perilaku pasar saat ini yang menunjukkan kepanikan karena berada di tengah ketidakpastian dapat menjadi awal mitigasi krisis.

Pandemi Covid-19 dan bauran kebijakan dari dalam dan luar negeri membawa tekanan pada pasar saham. Di Indonesia, IHSG melemah menjadi di bawah level psikologis 6.000. Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun 10,75% pada pekan kedua Maret (9-13 Maret 2020) dibandingkan pekan sebelumnya (2-6 Maret 2020). Demikian juga dengan kapitalisasi pasar yang menurun

sebesar 10,68% pada periode tersebut. Sepanjang perdagangan 9-13 Maret 2020, IHSG berada di level 4.907. Padahal, indeks akhir tahun lalu ditutup pada level 6.299,5. Kinerja mingguan IHSG ini merupakan kinerja terburuk sejak Oktober 2008 (Aini, 2020).

Mencermati hal lain, pandemi Covid-19 berdampak terhadap kurs rupiah, Maret 2020 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah. Pelemahan ini menjadi sorotan banyak pihak di tengah pandemi global ini, menyentuh angka Rp 16.000, nilai tukar ini merupakan yang terlemah dalam 5 tahun terakhir. Hingga 20 Maret 2020, kurs rupiah terhadap USD terus mengalami pelemahan. Berdasarkan kurs rupiah terhadap US Dolar yang diakses dari laman Bloomberg adalah sebesar Rp 16.037 per US dolar. Sebuah lonjakan yang cukup drastis dibandingkan dengan nilai tukar pada awal Maret ketika Indonesia belum terdeteksi pandemi covid-19. Melemahnya rupiah ini akan membawa banyak dampak terhadap roda perekonomian di Indonesia.

Barang-barang yang berasal dari luar negeri akan melonjak harganya. Korporasi atau perusahaan yang menggunakan bahan baku impor akan berkurang keuntungannya karena harga bahan baku yang mahal dan gangguan aktivitas bisnis akan menurunkan kinerja bisnis. Bagi perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar juga akan merugi karena bunga dan pokok utangnya harus dibayar menggunakan dolar. Jika tidak berangsur membaik, kedepan akan muncul kemungkinan-kemungkinan buruk seperti PHK dan pengangguran akan menjadi momok bagi bangsa ini. Begitu pula dampaknya pada perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvensi atau seseorang atau badan tidak mampu membayar utang tepat waktu. Selain itu, nilai tukar mata uang berpotensi mengalami depresiasi, arus modal keluar (*capital flight*) dan volatilitas pasar keuangan.

Kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dicanangkan melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan

masalah ini. Beberapa detail kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat yaitu penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety net*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

3. Guncangan terhadap Biaya Produksi di Berbagai Sektor

Wabah Covid-19 bukan hanya sekadar penyakit yang memengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara (Semaun, 2020). Hingga saat ini, wabah tersebut membuat permintaan menurun drastis sehingga diperlukan untuk menekan biaya produksi. Beberapa industri mengalami penurunan kapasitas (produksi) hampir 50%, kecuali industri-industri alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Dilansir dari pernyataan Menteri Keuangan, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibanding negara maju. Sejak wabah Covid-19 melanda tanah air, tingginya biaya produksi tersebut disebabkan antara lain karena jalur logistik yang sebelumnya tidak optimal menjadi semakin terhambat karena kebijakan pembatasan sosial, proses perizinan juga mengalami hambatan, sumber daya manusia yang tidak mendukung, dan ketergantungan terhadap negara lain.

Tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap negara lain berdampak pada ketersediaan bahan baku beberapa industri, hal ini disebabkan oleh gangguan produksi dan distribusi bahan baku. Padahal, pelaku industri dalam negeri memiliki tenggat waktu transaksi penjualan produk yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda-tunda, baik untuk pasar domestik, utamanya untuk memenuhi kebutuhan di kala lebaran maupun untuk pasar ekspor. Sementara, bahan baku yang dipasok terutama dari China untuk kontrak penjualan tahun ini tidak bisa seandainya dialihkan ke pemasok lain. Pasalnya, jenis bahan baku yang digunakan dalam produk yang akan diperjualbelikan perlu mendapat persetujuan dari *buyer* dan

diatur dalam kontrak. Untuk menggenjot produksi bahan baku, pelaku dalam negeri terpaksa harus merogoh kocek lebih lantaran harus ikut menanggung biaya produksi ekstra yang ada karena kondisi saat ini tergolong sebagai kondisi *force majeure*.

Dalam sektor pertanian, pada April 2020 terjadi penurunan Nilai Tukar Untuk Petani (NTUP) sebesar 1,72%. Hal ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan sebesar 1,64% sedangkan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Seluruh subsektor penyusun NTUP mengalami penurunan. Penurunan terbesar NTUP pada April 2020 terdapat di Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yaitu sebesar 2,48% (BPS, 2020). Dari perspektif produksi atau hulu, para petani dan produsen makanan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan protokol berproduksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi, khususnya di wilayah yang sudah terkontaminasi. Mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis *online*. Peran produsen, khususnya petani, dalam rantai pasok pangan sangat penting. Di tengah pandemi, terjadi penyesuaian yang cenderung bersifat masif. Hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama, fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri (Hirawan, 2020).

4. Guncangan terhadap Permintaan Konsumsi

Menurut BPS (2020), laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 tahun 2020 yaitu 4,97 menjadi 2,84 (-2,31). Fenomena yang terjadi adalah penjualan eceran terkonstraksi terutama pada penjualan sandang, bahan bakar kendaraan, peralatan informasi dan telekomunikasi, serta barang budaya dan rekreasi. Penjualan mobil penumpang dan sepeda motor juga terkonstraksi dan berdampak juga pada

penumpang angkutan rel dan udara cenderung tumbuh negatif. Volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga juga meningkat akibat masyarakat saat ini mayoritas melakukan segala aktifitas dari rumah.

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif Covid-19, hingga berdampak pada terjadinya *panic buying* ritel besar, seperti di DKI Jakarta dan Surabaya. Penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat kerap dikenal dengan istilah *panic buying*. Perilaku *panic buying* ini menurut Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Akibatnya, timbul kekhawatiran di masyarakat sehingga menimbulkan respons tindakan belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan diri. Dalam ekonomi, maraknya orang yang memburu suatu barang, seperti masker, memengaruhi sisi permintaan. Sebagaimana hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi berlaku yaitu jika terjadi permintaan tinggi karena tidak jumlah barang yang sedikit, maka harga barang akan semakin mahal. Faktor inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemburu rente atau pencari keuntungan. Sebab, di tengah kondisi *panic buying*, masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply*. Kelangkaan akibat tidak seimbangannya permintaan dan penawaran ini berujung pada kenaikan harga. Dalam artikel yang diterbitkan McKinsey, konsumen saat terjadi pandemi akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Korelasi dengan teori permintaan dimana semakin sedikit barang maka semakin tinggi harga yang diberikan, konsumen pun akan cenderung menanggalkan persepsi harganya.

Selain fenomena *panic buying*, perlahan perilaku masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. seperti yang dipaparkan oleh Riset Ekonomi, Perbankan & Industri Grup BCA (2020) tingkat *precautionary saving* meningkat sedangkan tingkat belanja konsumen menurun. Konsumen lebih banyak melakukan kegiatan

jual beli secara *online* dan membayar melalui media *online banking/shopping*. *Platform-platform* jual beli *online* inilah yang permintaannya meningkat sehingga turut pula menarik industri logistik baik barang maupun pengantaran makanan. Perubahan perilaku konsumen ini menjadi menarik karena telah mampu mengubah tatanan bisnis yang lama menjadi tatanan yang baru. Bila dahulu permintaan pita lebar (*bandwidth*) internet selalu tidak memenuhi kuota, saat ini infrastruktur internet malah terancam gagal menampung permintaan *bandwidth* yang melonjak. Akibat penyebaran virus Covid-19, masyarakat Indonesia juga menjadi lebih perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan.

Sebanyak 44% konsumen mengaku menjadi lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan dan 37% lebih sering mengkonsumsi minuman bervitamin.

Aspek kehidupan yang cenderung mengarah pada situasi normal baru, membuat perubahan situasi termasuk pola rantai pasok pangan. Kondisi inilah yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini (produksi hingga konsumsi dan hulu hingga hilir) agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjamin. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menggambarkan perkiraan stok dan kebutuhan pangan nasional pada berbagai komoditas yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkiraan Stok dan Kebutuhan Pangan Maret-Mei 2020 (dalam ton)

Komoditas	Perkiraan Stok Maret- Mei 2020	Perkiraan Kebutuhan Maret-Mei 2020	Perkiraan Stok AkhirMei 2020
Beras	15,9 juta	7,6 juta	8,3 juta
Jagung	10,3 juta	6 juta	4,3 juta
Bawang Merah	588 ribu	347 ribu	241 ribu
Bawang Putih	86 ribu	151 ribu	(65 ribu)
Cabai Besar	311 ribu	278 ribu	33 ribu
Cabai Rawit	327 ribu	258 ribu	69 ribu
Daging Sapi	183 ribu	202 ribu	(19 ribu)
Daging Ayam	1,1 juta ton	881 ribu	219 ribu
Ras			
Gula Pasir	987 ribu	708 ribu	279 ribu

Sumber: Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam Hirawan (2020)

Berdasarkan tabel di atas, beberapa komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan gula pasir akan mencukupi. Namun berbeda halnya dengan komoditas pangan yang selama ini mengandalkan impor, seperti bawang putih dan daging sapi tampaknya perlu menjadi perhatian serius karena perkiraan stok hingga bulan Mei 2020 tampaknya tidak mencukupi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan stimulus fiskal sebesar Rp 405,1 triliun, di mana Rp110 triliun di antaranya akan dialokasikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, termasuk penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)), kartu pra kerja, diskon tarif listrik (untuk pelanggan 450 dan 900VA), pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar, dan penyesuaian anggaran pendidikan. Hal ini setidaknya dapat mengurangi beban

yang ditanggung oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang rentan terkena imbas dari penyebaran Covid-19 ini secara sosial dan ekonomi (Hirawan, 2020).

5. Guncangan terhadap Pengeluaran Pemerintah

BPS (2020) mengemukakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 3,74%. Fenomena saat ini, realisasi belanja bantuan sosial yang meningkat terutama pada belanja untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan belanja bantuan untuk penanggulangan kemiskinan. Penurunan belanja barang dan jasa (operasional dan non operasional serta belanja perjalanan) disebabkan oleh meluasnya dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan beberapa penundaan maupun

pembatalan kegiatan sejak minggu kedua bulan Maret 2020.

Menurut Riset Ekonomi, Perbankan & Industri Grup BCA, dana alokasi belanja shift dari infrastruktur ke kesehatan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk menambah alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020, pemerintah memiliki tambahan belanja APBN untuk Covid-19 berkisar Rp 405,1 T untuk belanja kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter, *social safety net* untuk penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik, insentif pajak dan bea untuk industri juga stimulus kredit usaha rakyat (KUR), yang terakhir adalah program pemulihan ekonomi nasional termasuk di dalamnya adalah restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha.

Bertambahnya APBN tersebut menyebabkan defisit anggaran dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini angkanya mencapai 5,07%, angka ini melampaui batas ketentuan undang-undang yang dipatok di 3% dari PDB. Pelebaran defisit berarti akan ada penambahan pengeluaran. Besarnya stimulus dan pelebaran defisit merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Risiko pelebaran defisit APBN hingga tahun 2022 perlu diwaspadai. Setidaknya terdapat empat risiko yang mengancam :

1. Risiko dominasi kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN). Penerbitan surat utang ini merupakan salah satu sumber pembiayaan defisit. Sekitar 35 hingga 40 persen SUN dipegang oleh investor asing. Namun, keadaan defisit yang disebutkan di atas membuat struktur anggaran rentan terhadap pelarian modal yang secara tiba-tiba (*sudden capital outflow*). Akibatnya, imbal hasil SUN meningkat dan di masa yang akan datang beban biaya penerbitan SUN menjadi lebih besar.
2. Risiko pelemahan nilai tukar mata uang rupiah. Modal yang keluar secara tiba-tiba di pasar keuangan akan mendorong rupiah terdepresiasi. Akibatnya, beban biaya impor dan pembayaran cicilan utang menjadi mahal dan semakin memberatkan.
3. Risiko kesulitan yang dialami swasta dalam mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri karena investor lebih memilih surat utang pemerintah dibanding swasta (*crowding out*). Akibatnya, swasta harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding pemerintah.
4. Risiko kenaikan utang luar negeri swasta. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya pihak swasta dalam mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri sehingga pilihan utang luar negeri digunakan. Terlebih ketika suku bunga di luar negeri menurun. Pilihan ini berisiko gagal bayar karena utang tersebut berdenominasi dolar AS yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Keberadaan risiko-risiko tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pengawasan penggunaan anggaran yang telah dikururkan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keefektifan stimulus dalam menekan dampak negatif Covid-19 pada rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Efektivitas ini perlu dilakukan untuk mencegah tumpulnya kebijakan yang mempertaruhkan mahalnya pelebaran defisit anggaran negara (Litbang Kompas, 2020).

Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2020, pemerintah telah menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1, stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN/APBD. Kebijakan stimulus tahap 1 dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, stimulus tahap 2 dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang tinggi (UNPAD, 2020).

Presiden Indonesia menyoroti agenda untuk memperjuangkan Indonesia dalam dua perang, yaitu perang melawan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi. Bank Indonesia (BI) memiliki peran vital untuk dimainkan dalam memastikan langkah-langkah kebijakan untuk mengantisipasi dampak Covid-19 pada keuangan pasar, dan untuk mengurangi dampak ekonomi makro. Kebijakan utama untuk stabilisasi pasar keuangan telah diperkenalkan yakni BI akan terus memantau perkembangan di pasar keuangan dan ekonomi, termasuk dampak dari wabah dan terus memperkuat kebijakan perpaduan yang dingin dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas

terkait, untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Kondisi ini menggambarkan bahwa Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Untuk itu, dibutuhkan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan dan mengambil langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari paper ini yaitu bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19 meliputi pada pasokan tenaga kerja 2.084.593 pekerja secara Nasional mengalami PHK dan dirumahkan, melemahnya nilai tukar mata uang, IHSG, cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan inflasi, kredit macet (NPL), serta pelebaran defisit neraca pembayaran dan perdagangan, gangguan produksi dan distribusi bahan baku, terjadinya fenomena *panic buying*, dan terakhir pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 3,74%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Wirdatul. 2020. Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi Covid-19. Jakarta : Kompas.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2020. *Berita Resmi Statistik – 5 Mei 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Laporan Bulanan – Data Sosial Ekonomi Edisi 120 (Mei 2020)*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Djalante et al. 2020. *Progress in Disaster Science: Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia - Period of January to March 2020*. Progress and Disaster Sciences. 6(20).
- Haripin, Muhamad. 2020. *Dampak Politik-Keamanan COVID-19*. Jakarta : Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hirawa, Fajar B. 2020. *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19*. CSIS Commentaries. Humas UNS.
- UNS. 2020. *Dampak Covid-19 di Indonesia Menurut Pakar Ekonomi UNS*. Solo :Universitas Negeri Surakarta.
- Kementerian Keuangan. 2020. *Indonesia macroeconomic update: Drawing a silver lining onpost-covid 19 era*. Jakarta: Riset Ekonomi, Perbankan & Industri Grup BCA.
- Nabilla, Syeikha. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia*. Bandung:Universitas Padjajaran.
- Semaun, Syahriyah. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 ; Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Sulawesi Selatan : IAIN Pare-Pare.
- Sihaloho, Estro D. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Bandung:Universitas Padjajaran.